



LAPORAN KINERJA TAHUN

2023

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

© 2023

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV BPISDKP TA 2023

Jembrana, 15 Januari 2024
Mengetahui,
Kepala Balai



Dr. Teja Arief Wibawa, S.Pi., M.Si
NIP. 198102172005021001

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala BPISDKP serta memberikan informasi kinerja yang telah dicapai kepada publik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2023, terdapat 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur per triwulan dan tahunan, yaitu: Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi; Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi; Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar; Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP; Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP; Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP; Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPISDKP; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP; Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP dan Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP. Pada LKJ ini akan dilaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai hingga bulan Desember 2023.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2023 ini, diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk tahun berikutnya.

Jembrana, 15 Januari 2024

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan



Dr. Teja Arief Wibawa, S.Pi., M.Si
NIP. 19810217 200502 1 001

Ringkasan Eksekutif

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) dalam rencana kerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan BPISDKP yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”. Kedua sasaran kinerja tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2023.

BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis baru di lingkup Sekretariat Jenderal yang diresmikan pada bulan Maret 2022 untuk organisasinya dan April untuk pejabatnya. Sebelumnya pada tahun 2022, DIPA BPISDKP masih tergabung pada DIPA Pusdatin, pada tahun 2023 ini, DIPA BPISDKP telah terpisah dari Pusdatin dan dikelola oleh BPISDKP. Analisis terhadap hasil pengukuran IKU pada Tahun 2023 disampaikan pada tabel di bawah ini.

Kinerja pengelolaan anggaran BPISDKP meliputi anggaran total sebesar **Rp.22.303.218.000**. Selama tahun 2023, tantangan yang dihadapi BPISDKP adalah kurangnya jumlah personel teknis, kendala dalam pengelolaan anggaran dengan adanya blokir pada salah satu komponen anggaran, dan pelaksanaan kegiatan data citra satelit radar dengan system lama yang mempengaruhi keberhasilan akuisisi data. Sebagai upaya perbaikan kinerja kedepan, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan Tim SAKIP BPISDKP akan menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih seksama, terutama terkait rencana penyerapan anggaran, dan melakukan upgrade system yang digunakan untuk kegiatan akuisisi data citra satelit radar. Rencana perbaikan ini berdasarkan pada evaluasi capaian dan hasil pelaksanaan pada tahun 2023, diharapkan upaya perbaikan ini dapat menghindari terjadinya permasalahan serupa pada tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET TW IV	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	80	80	100	120
	2	Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi (jenis)	2	2	2	100
	3	Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	80	80	100	120
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92	92	100	108,70
	5	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	79	79	86,28	109,21
	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP (nilai)	93,75	93,75	92,37	98,53
	7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86	86	87,40	101,63
	8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100	100	100	100
	9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	75	75	75	100
	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP (nilai)	80,5	80,5	84,30	104,72
	11	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (indeks)	83	83	97	116,87

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP.....	3
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP.....	3
1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	4
1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional.....	5
1.2.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	6
Bab II. Perencanaan Kinerja	7
2.1. Sasaran Kegiatan	7
2.2. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	8
2.3. Program dan Kegiatan.....	9
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	11
3.2.1. Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	12
3.2.2. Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	13
3.2.3. Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14
3.2.4. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP.....	16
3.2.5. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP	18

3.2.6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP	21
FORMULA		21
3.2.7.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP	23
3.2.8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP	25
3.2.9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP	26
3.2.10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP.....	33
3.2.11.	Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP	34
3.3.	Realisasi Anggaran.....	36
3.4.	Analisis Efisiensi Sumber Daya	37
3.4.1.	Analisa Efektivitas Anggaran	38
Bab IV.	Penutup.....	41
4.1.	Kesimpulan	41
4.2.	Pemanfaatan Informasi Kinerja.....	41
4.3.	Rencana Tindak Lanjut	42
LAMPIRAN		44

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP	4
Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai ASN BPISDKP	4
Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP	5
Tabel 4. Distribusi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP	5
Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional	6
Tabel 6. Target Indikator Kinerja Utama BPISDKP Tahun 2023	9
Tabel 7. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Tahun 2023	11
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	12
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	14
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Data Citra Satelit Radar yang dikelola untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15
Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP	17
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP	20
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP	22
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP	24
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP	25
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP	32
Tabel 17. Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP	33
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP	33
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP	35
Tabel 20. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP hingga 31 Desember 2023	36
Tabel 21. Kriteria Efektivitas Keuangan Lembaga (Kepmendagri No. 690.900.327, 1996)	38
Tabel 22. Rasio efisiensi anggaran BPISDKP	39
Tabel 23. Rincian dan Rasio Efisiensi Anggaran per IKU	40

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPISDKP	3
Gambar 2. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP Tahun 2023 pada Aplikasi Kinerjaku.....	10
Gambar 3. Hasil kegiatan Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar selama tahun 2023	16
Gambar 4. Bukti keaktifan Tahun 2023 pada portal KKP.....	17
Gambar 5. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan lingkup Setjen KKP	18
Gambar 6. Nilai IP ASN BPISDKP Tahun 2023	20
Gambar 7. Capaian IKU IP ASN Lingkup Sekretariat Jenderal KKP.....	21
Gambar 8. Capaian IKU IKPA Lingkup Sekretariat Jenderal KKP.....	23
Gambar 9. Nilai IKPA BPISDKP hingga akhir triwulan IV tahun 2023.....	23
Gambar 10. Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP tahun 2023.....	24
Gambar 11. Capaian IKU NKA di lingkup Sekretariat Jenderal KKP	25
Gambar 12. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal KKP	32
Gambar 13. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP di lingkup Sekretariat Jenderal KKP.....	34
Gambar 14. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 31 Desember 2023	37

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja BPISDKP Tahun 2023 disusun sebagai media informasi atas kinerja yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Laporan ini juga berperan sebagai dokumen yang berisi acuan untuk upaya perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BPISDKP.

BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal melaksanakan kinerja dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, BPISDKP berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di sektor kelautan dan perikanan nasional. Pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan nasional menjadi bagian dari program dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah dirancang oleh Pemerintah Indonesia dan dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologi bangsa, menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional lima tahun kedepan. Arah RPJMN 2020-2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Tiga kata kunci dari arahan ini, yaitu : Struktur Perekonomian yang Kokoh, Keunggulan Kompetitif Wilayah dan SDM Berkualitas.

Keluarnya Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka BPISDKP wajib untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan;
2. Menyampaikan Laporan Kinerja Interim pada setiap Triwulan kepada Kepala Pusat.

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja BPISDKP Tahun 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permen KP 35 TAHUN 2023
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2023, dihadapi beberapa permasalahan yang berdampak terhadap upaya pemenuhan kebutuhan data geospasial kelautan dan perikanan untuk mendukung program kebijakan KKP, antara lain:

1. Terbatasnya SDM bidang teknis. Dengan pemindahan SDM ke BRIN, SDM teknis BPISDKP yang tersisa sebanyak 5 (lima) orang PNS dengan jabatan fungsional Analis Data Ilmiah, Surveyor Pemetaan, dan Pranata Komputer.
2. BPISDKP memiliki program prioritas nasional Sarana Data Citra Satelit Radar, namun sistem radar yang telah digunakan sudah lewat masanya dan perlu upgrade ke versi terbaru mengakibatkan kegagalan akuisisi atau reject data radar.
3. Blokir anggaran salah satunya pada komponen upgrade sistem radar.

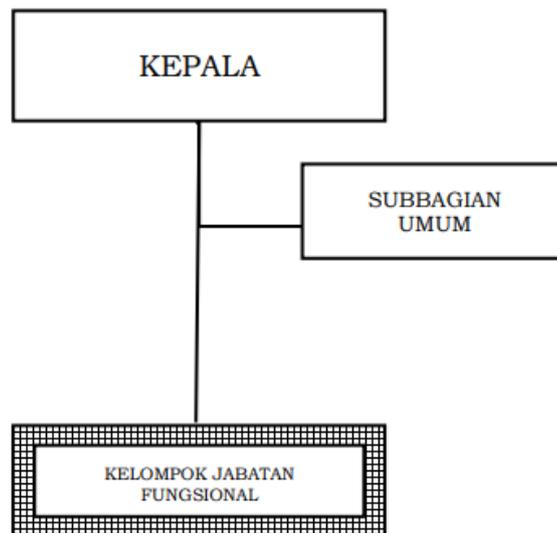
1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dinyatakan bahwa Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kelautan dan perikanan.

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPISDKP

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP

BPISDKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPISDKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. Pemberian dukungan administrasi.

1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mengemban tugas kerja, BPISDKP didukung oleh 48 orang pegawai, yang terdiri dari 16 orang Pegawai ASN dan 32 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Balai	1 orang
2.	Kepala Subbagian Umum	1 orang
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	9 orang
4.	Jabatan Fungsional Umum	5 orang
5.	PPNPN	32 orang

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, pegawai ASN di BPISDKP mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai ASN BPISDKP

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	4 orang
2.	S2	6 orang
3.	S1	19 orang
4.	D3	2 orang
5.	SLTA	14 orang
6.	SMP	1 orang
6.	SD	2 orang
Jumlah		48 orang

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 2 orang golongan IV dan 14 orang golongan III. Sedangkan berdasarkan gender, perbandingan jumlah pegawai negeri sipil antara pegawai Pria sebanyak 9 orang dan Wanita sebanyak 7 orang. Distribusi aparatur BPISDKP baik pegawai

negeri sipil maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) sesuai Kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP

No.	Status Kepegawaian	Kelompok				Jumlah Total (orang)
		Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Laboratorium dan BARATA	Struktural dan Manajerial	
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9	5	-	2	16
2.	PPNPN	-	-	7	25	32
Jumlah		9	5	7	27	48

Tabel 4. Distribusi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP

No.	Gender	Golongan/ruang						Jumlah Total (orang)
		IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	
1.	Pria	2	1	3	1	1	-	8
2.	Wanita	-	3	2	2	1	-	8
Jumlah		2	4	5	3	2	-	16

1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPISDKP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Kerja BPISDKP terdiri atas Analis Data Ilmiah, Surveyor Pemetaan, Pranata Komputer, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata keuangan APBN, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perencana, dan Fungsional Umum. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional di BPISDKP:

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional

No.	Jenjang Jabatan Lingkup BPISDKP	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)					TOTAL
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Terampil	
1.	Analisis Data Ilmiah		2	1			3
2.	Surveyor Pemetaan		1				1
3.	Pranata Komputer			1			1
4.	Analisis Pengelola Keuangan APBN		1				1
5.	Pranata Keuangan APBN				1		1
6.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa			1			1
7.	Perencana			1			1
8.	Fungsional Umum						5
9.	Struktural						2
Total							16

Note : Termasuk Pejabat Transformasi

1.2.5. Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2023 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja BPISDKP berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPISDKP tahun 2023 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Analisa yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya didasarkan pada hasil capaian kinerja pada tahun ini, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Sistematisa penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III BPISDKP adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan sumber daya manusia, sistematisa penyajian.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja BPISDKP yang telah dicapai dalam satu tahun.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

- a. Capaian Kinerja Organisasi
 - b. Evaluasi dan Analisis Kinerja
 - c. Realisasi Anggaran
4. **Bab IV Penutup**, berisi simpulan umum atas capaian kinerja BPISDKP serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II. Perencanaan Kinerja

2.1. Sasaran Kegiatan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menjelaskan bahwa BPISDKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan tugas BPISDKP meliputi fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Pemberian dukungan administrasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dirumuskan 2 sasaran kegiatan, yang dicapai melalui 11 Indikator Kinerja Utama dalam perjanjian kinerja. Kedua sasaran kegiatan tersebut adalah:

- 1) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - IKU 1. Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen);
 - IKU 2. Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi (jenis);
 - IKU 3. Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen).
- 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- IKU 4. Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen);
- IKU 5. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (indeks);
- IKU 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP (nilai);
- IKU 7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai);
- IKU 8. Presentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (persen);
- IKU 9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen);
- IKU 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai);
- IKU 11. Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (indeks).

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator kinerja yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

2.2. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pada tahun 2023 BPISDKP mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dan diuraikan ke dalam Indikator Kinerja Utama.

Penetapan target indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPISDKP Tahun 2023 yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II yaitu Kepala Pusdatin dan Kepala BPISDKP. Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2023 terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditampilkan pada tabel 6. Perjanjian Kinerja BPISDKP telah mengalami satu kali perubahan pada bulan November 2023, yaitu pada target IKU 6 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang berubah dari 89 menjadi 93,75 dan IKU 10 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP dengan target 95 menjadi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP dengan target 80,4.

2.3. Program dan Kegiatan

BPISDKP merupakan unit Eselon III yang berada di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi KKP. Pada Tahun Anggaran 2023, berdasarkan pagu anggaran yang dikelola oleh PPK, BPISDKP mendapatkan anggaran operasional sebesar **Rp.22.303.218.000**.

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dijabarkan kepada target kinerja tahunan dan triwulanan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) BPISDKP Triwulanan dan Tahunan.

Tabel 6. Target Indikator Kinerja Utama BPISDKP Tahun 2023

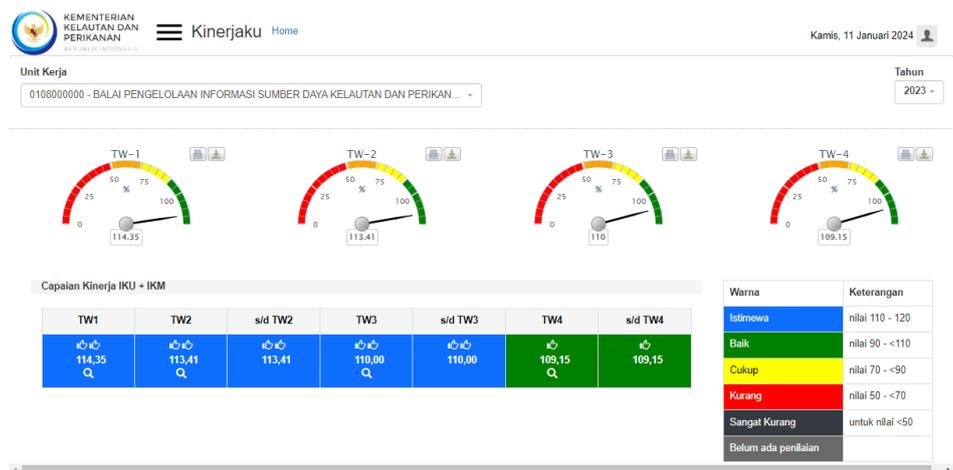
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	80
		2. Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi (jenis)	2
		3. Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	80
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4. Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92
		5. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	79
		6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP (nilai)	93,75
		7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86
		8. Presentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	75
		10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	80,5
		11. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (indeks)	83

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP. Analisis capaian kinerja tahun 2023 mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran BPISDKP yang meliputi pelayanan permintaan data geospasial, verifikasi dan validasi data geospasial, pengelolaan data citra satelit radar, serta pelayanan ketatausahaan dan dukungan manajerial.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu <https://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Pada periode tahun 2023 terdapat 11 indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Indikator kinerja tersebut memiliki periode pengukuran berbeda-beda. Pada akhir tahun 2023 seluruh indikator kinerja diukur capaiannya dan dianalisa sesuai hasil. Capaian kinerja IKU BPISDKP periode Tahun 2023 pada aplikasi Kinerjaku dengan nilai 109,15% dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP Tahun 2023 pada Aplikasi Kinerjaku

Pada Laporan Kinerja BPISDKP Tahun 2023 ini akan disampaikan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang sudah dicapai untuk 11 IKU BPISDKP selama periode Januari hingga Desember 2023. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP hingga Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	80	100	120
	2	Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi (jenis)	2	2	100
	3	Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	80	100	120
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92	100	108,70
	5	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	79	86,28	109,21
	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP (nilai)	93,75	92,37	98,53
	7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86	87,40	101,63
	8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100	100	100
	9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	75	75	100
	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	80,5	84,30	104,72
	11	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (indeks)	83	97	116,87

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kinerja dan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tersebut. Indikator kinerja BPISDKP pada tahun 2023 memiliki periode pengukuran triwulan dan tahunan, dimana pada akhir tahun 2023 seluruh IKU akan diukur capaiannya. Pada laporan kinerja ini akan disampaikan hasil yang telah dicapai hingga Desember 2023 dan permasalahan serta kendala yang dihadapi sebagai evaluasi dan bahan perbaikan untuk

pelaksanaan kinerja di triwulan berikutnya. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi

Menunjukkan persentase permintaan data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi dari total permintaan data yang masuk dari stakeholder, baik internal KKP maupun dari instansi di luar KKP.

Permintaan data tersebut disampaikan melalui surat permohonan data, dan penyampaian data yang diminta dilakukan dengan mengirimkan surat balasan kepada pemohon dengan mencantumkan link folder drive berisi data yang diminta. Permintaan data dinyatakan telah terpenuhi apabila surat balasan berisi link folder drive data telah dikirimkan pada pemohon.

Metode pengukuran:

$$\frac{\text{jumlah permintaan data yang dipenuhi}}{\text{jumlah permintaan data total}} \times 100\%$$

*Jumlah permintaan data berdasarkan pada surat permohonan data yang masuk ke BPISDKP.

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi					
2023	Target 2022	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Realisasi	% Capaian
		75%	100%	120	80	100

Target pada tahun 2023 adalah 80% permintaan data yang terpenuhi dengan periode pengukuran tahunan. Target tersebut telah meningkat dari target tahun sebelumnya yaitu sebesar 75%. Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2023 realisasi yang dicapai adalah 100% dengan capaian 120%. Capaian tersebut dihasilkan dari pelayanan terhadap permintaan data yang masuk kepada BPISDKP, baik dari internal KKP maupun dari instansi eksternal. Pada periode Januari hingga Desember 2023 permintaan data yang telah dilayani yaitu:

- Permintaan data penelitian dari Pusdatin atas nama Firman Ibusina
- Permintaan data batimetri (shp/CAD) dan data angin tahun 2012-2022 untuk area Pantai Gunaksa, Klungkung dari mahasiswa a.n Putu Diah Yusi Jayatri

- Permintaan data informasi sumber daya kelautan dan perikanan untuk wilayah WPP NRI 711 dari PT Kanzun Bahriyah Sentosa

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan target IKU ini adalah

- Penerimaan permohonan permintaan data dan penyampaian permintaan pada tim kerja yang menangani data tersebut
- Tim kerja menyiapkan data yang diminta dan mengunggah data tersebut pada folder GDrive untuk kemudian disampaikan pada pemohon melalui surat balasan
- Pengiriman surat balasan berisi link folder Gdrive berisi data yang diminta pada pemohon

Permintaan data pada tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 13 permintaan. Tidak terdapat kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan. Factor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Koleksi data pada BPISDKP terdokumentasi dengan baik sehingga mudah ditemukan saat dibutuhkan
- Jenis data yang diminta telah tersedia di BPISDKP sehingga pemenuhan permintaan dapat dilakukan dengan cepat
- Tim kerja bekerja dengan efektif dan efisien untuk memenuhi permintaan data tersebut

3.2.2. Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi

Memfasilitasi verifikasi dan validasi data-data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang disediakan oleh BPISDKP, untuk memastikan bahwa data-data tersebut telah memenuhi kriteria verifikasi dan validasi yang sesuai. Mengingat tugas dan fungsi BPISDKP sebagai balai yang mengelola informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, verifikasi dan validasi data perlu dilakukan untuk menjamin kualitas dan keakuratan data.

Indikator kinerja tersebut dikukur melalui jenis data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan standar data geospasial yang telah disahkan oleh Kepala BPISDKP. Untuk tahun 2023, target yang diharapkan adalah 2 (dua) jenis data dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 9.Target dan Realisasi IKU Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi

SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi					
2023	Target 2022	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Realisasi	% Capaian
	1	1	100	2	2	100

Hingga Desember 2023, telah dihasilkan dua jenis data yang terverifikasi dan tervalidasi.

Kedua jenis data tersebut adalah:

- Basis data daerah penangkapan ikan berbasis komoditas ikan, dimana pada tahun ini fokus diarahkan pada ikan pelagis kecil yaitu ikan teri, ikan layur, dan ikan layang
- Data geospasial sebaran tambak aktif dan non aktif berbasis data citra satelit Sentinel 1 dan 2 di Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain:

- Pengembangan aplikasi Daerah Penangkapan Ikan untuk nelayan
- Sosialisasi aplikasi Daerah Penangkapan Ikan pada nelayan di Pelabuhan Prigi, Jembrana, dan Kutai
- Pengolahan dan analisis data citra Sentinel-2 untuk pemetaan sebaran tambak
- Survey lapangan untuk verifikasi dan validasi data tambak dengan kondisi lapangan

Target tahun 2023 meningkat dua kali lipat dibandingkan target tahun 2022 yang hanya 1 jenis data. Dari tabel capaian diatas, terlihat bahwa pada tahun 2023 telah berhasil meraih realisasi 2 jenis data sesuai target dengan capaian 100%. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan didukung oleh kerjasama tim yang baik dan perencanaan serta koordinasi yang baik dengan partner kerja dan instansi lain yang terkait. Untuk tahun 2024 direncanakan untuk meningkatkan kualitas aplikasi agar lebih baik.

3.2.3. Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Meliputi citra satelit radar yang dikelola oleh BPISDKP selama tahun 2023. Proses pengelolaan data tersebut meliputi pemesanan, proses akuisisi dan pengolahan data dari raw data hingga menjadi data level 2 yang menghasilkan informasi. Data yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemanfaatan citra

satelit radar untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan oleh Pusdatin KKP.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara jumlah data yang dikelola dengan jumlah data yang dimanfaatkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Target pada tahun 2023 adalah pemanfaatan data sebesar 80% dengan periode pengukuran tahunan. Hingga akhir tahun 2023 telah berhasil dicapai realisasi sebesar 100% dimana seluruh data yang berhasil diakuisisi telah termanfaatkan oleh stakeholder. Data citra satelit radar yang berhasil diakuisisi dimanfaatkan untuk kegiatan pengawasan kegiatan IUU Fishing sebanyak 96.56% dan pemetaan tambak sebanyak 3.44%.

IKU ini mengalami perubahan dibandingkan dengan IKU tahun 2022. Sebelumnya pengukuran IKU didasarkan pada jumlah scene yang di akuisisi selama 1 tahun, namun pada tahun 2023 ini pengukuran IKU lebih difokuskan pada pemanfaatan data citra radar yang berhasil diakuisisi. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menjawab kebutuhan stakeholder.

Metode pengukuran:

$$\frac{\text{jumlah data citra yang termanfaatkan}}{\text{jumlah data citra yang berhasil diakuisisi}} \times 100\%$$

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Data Citra Satelit Radar yang dikelola untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

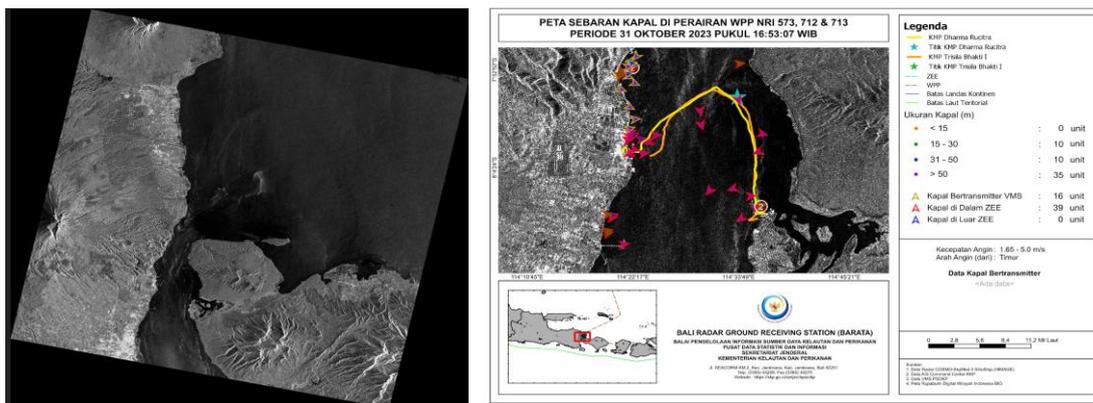
SK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
2023	Target 2022	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Realisasi	% Capaian
	150 scene	150 scene	100	80	100	120

Hingga Desember 2023 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Validasi lapangan di Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk
- b. Validasi lapangan di Pelabuhan Tanjung Wangi
- c. Validasi lapangan di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar
- d. Koordinasi dengan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Nizam Zachman untuk persiapan survey dan validasi lapangan
- e. Akuisisi data citra satelit, analisis dan pengolahan data

Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah:

- Adanya blokir anggaran yang baru dibuka pada triwulan III sehingga pelaksanaan akuisisi juga terlambat
- Beberapa kali gagal akuisisi dan data citra mengalami reject akibat kualitas yang kurang baik, dikarenakan sistem yang sudah lewat masanya dan perlu diupgrade ke versi terbaru



Gambar 3. Hasil kegiatan Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar selama tahun 2023

3.2.4. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Pada lingkup Kementerian kelautan dan Perikanan, hingga Juni 2023 sistem manajemen pengetahuan dilakukan melalui aplikasi <https://www.bitrix24.net> dengan menggunakan klasifikasi *maximize*, yaitu capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan sejak September 2023 kegiatan pendukung IKU ini dilanjutkan melalui website <https://portal.kkp.go.id/> dengan menggunakan NIP/email KKP sebagai username dan password email sebagai paSKword. Penilaian meliputi keaktifan dengan bobot 100% dengan nilai maksimal 4 dan nilai minimal 3. Adapun nilai tersebut diperoleh dari jenis unggahan pada website dengan rincian nilai:

- Unggahan terkait kegiatan mendapat nilai 0.5
- Unggahan berupa infografis mendapat nilai 1
- Unggahan berupa video mendapat nilai 3

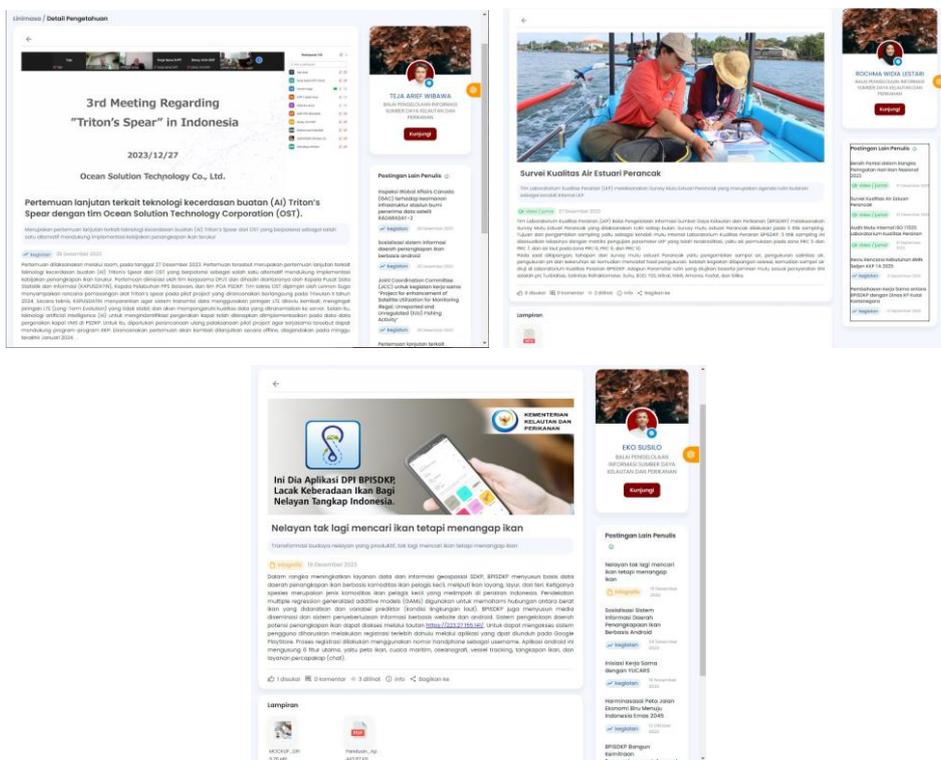
Pegawai yang wajib dinilai terkait IKU ini adalah Kepala Balai.

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP					
2023	Target 2022	Realisasi	% Capaian	Target TW IV	Realisasi	% Capaian
	88	100	113,64	92	100	108.69

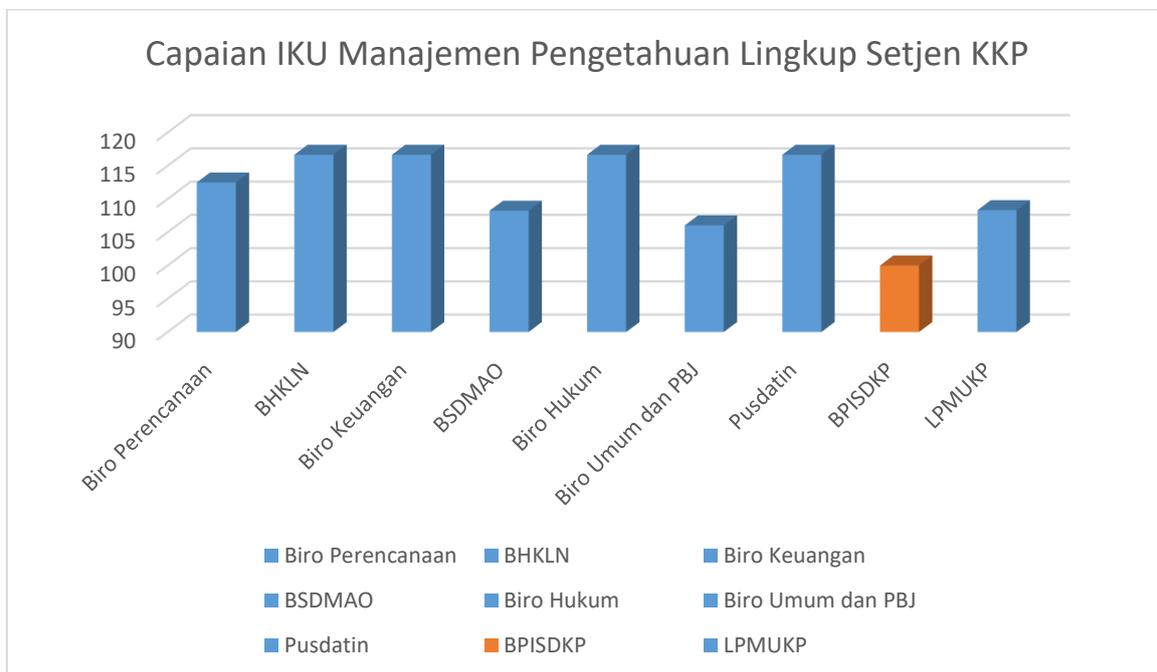
Hingga Desember 2023 telah dilaksanakan keaktifan pada website portal KKP dalam bentuk unggahan berupa artikel dan infografis oleh pejabat terkait. Pada tahun 2023 ini telah diperoleh realisasi 100% terhadap keikutsertaan dan keaktifan yang telah divalidasi oleh Pusdatin. Realisasi ini sama dengan realisasi pada tahun 2022. Factor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan IKU ini adalah:

- Tim kerja yang aktif memberikan pengingat kepada Kepala Balai untuk mengunggah artikel pada portal KKP
- Tim pelayanan teknis yang selalu siap mendokumentasikan berbagai kegiatan di BPISDKP sebagai bahan penyusunan artikel



Gambar 4. Bukti keaktifan Tahun 2023 pada portal KKP

Jika dibandingkan dengan satker lain di lingkup Sekretariat Jenderal KKP, maka capaian IKU MP BPISDKP dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 5. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan lingkup Setjen KKP

Dari grafik terlihat bahwa capaian BPISDKP walaupun sudah melebihi target namun masih rendah dibandingkan dengan satker lain di lingkup Setjen. Untuk pelaksanaan di tahun 2024 diharapkan kualitas dan kuantitas unggahan dapat meningkat sehingga nilai capaian dapat meningkat juga.

3.2.5. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten, profesionalitas dan berintegritas. Indeks Profesionalitas ASN terukur dari kompetensi, kinerja, keahlian dan kedisiplinan ASN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, sedangkan integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan normal. Indeks profesionalitas dan integritas ditetapkan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berkepribadian. Aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki kompetensi yang dipandang sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dan integritas tinggi dalam mematuhi aturan dan norma yang berlaku/ditetapkan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terbagi menjadi 4 komponen, yaitu:

- a) Kualifikasi (bobot 25%)

Mencakup tingkat Pendidikan terakhir masing-masing pegawai

- b) Kompetensi (bobot 40%)

Terdiri dari diklat dan seminar dengan penjelasan sebagai berikut:

- Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);
- Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
- Diklat 20 JP (jam pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua koma lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;
- Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);

c) Kinerja (bobot 30%)

Merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 360⁰

d) Disiplin (bobot 5%)

Ditentukan berdasarkan hukuman disiplin yang diterima pegawai, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinya.

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP					
2023	Target 2022	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Realisasi	% Capaian
	78	81,92	105,03	79	86,28	109,22

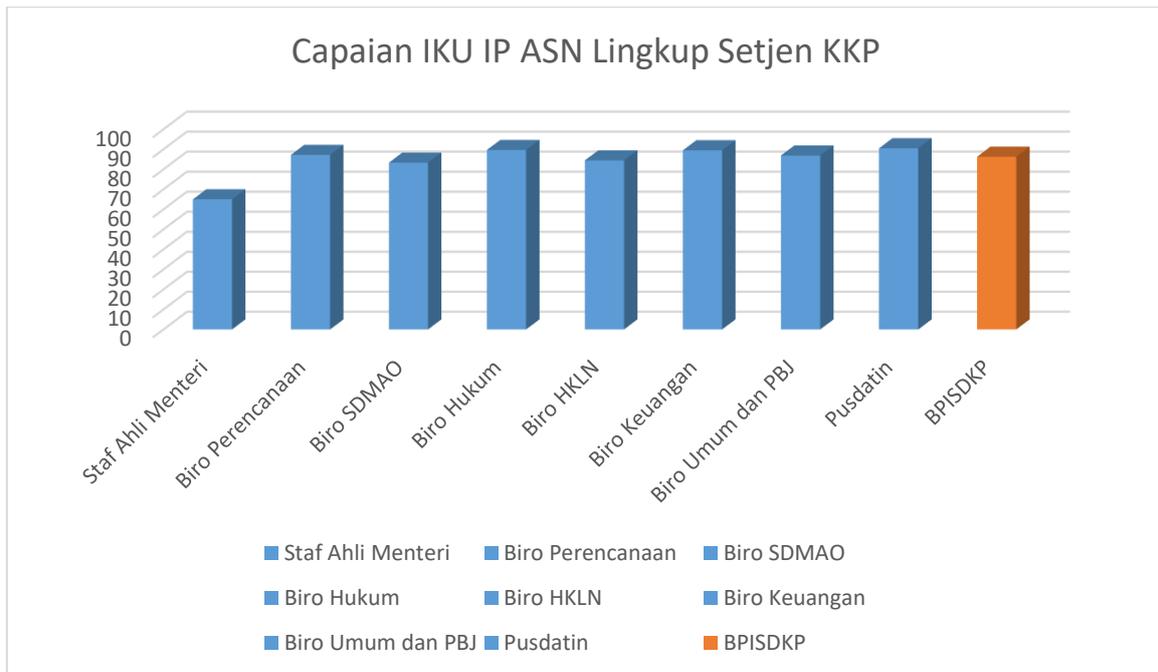
Untuk mendukung tercapainya IKU ini, telah dilaksanakan upaya berupa penyampian informasi pelatihan dan seminar yang bisa diikuti melalui grup WhatsApp, himbuan pada pegawai BPISDKP untuk mengikuti seminar, workshop, bimtek, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, serta untuk segera mengunggah sertifikat bukti keikutsertaan pada e-pegawai. Target pada tahun 2023 adalah 79 dengan periode pengukuran semesteran. Hingga Desember 2023, Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP terpantau pada nilai 86,28 dimana nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan target dari 78 menjadi 79. Peningkatan tersebut diiringi dengan peningkatan realisasi yang cukup tinggi dari 81,92 menjadi 86,28 sehingga persentase capaian juga ikut naik sebanyak 4% dari 105,03% menjadi 109,22%.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STAF AHLI MENTERI	2	22.5	90 %	12.5	31.25 %	25	83.33 %	5	100 %	65	RENDAH
2	BIRO PERENCANAAN	53	21.43	85.72 %	35	87.5 %	25.75	85.83 %	5	100 %	87.19	TINGGI
3	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	64	20.91	83.64 %	28.85	72.13 %	24.53	81.77 %	5	100 %	79.29	SEDANG
4	BIRO HUKUM	35	21.71	86.84 %	38.5	96.25 %	24.43	81.43 %	5	100 %	89.64	TINGGI
5	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	36	21.58	86.32 %	25.06	62.65 %	25	83.33 %	5	100 %	76.65	SEDANG
6	BIRO KEUANGAN	52	21.1	84.4 %	36.86	92.15 %	25	83.33 %	5	100 %	87.96	TINGGI
7	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	137	20.99	83.96 %	36	90 %	24.82	82.73 %	5	100 %	86.81	TINGGI
8	PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI	75	21.04	84.16 %	39.53	98.83 %	25	83.33 %	5	100 %	90.57	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	16	22.38	89.52 %	35.47	88.67 %	23.44	78.13 %	5	100 %	86.28	TINGGI

Gambar 6. Nilai IP ASN BPISDKP Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan satker lain di lingkup Sekretariat Jenderal KKP, maka capaian IKU IP ASN BPISDKP dapat dilihat pada grafik di gambar 7. Pada grafik terlihat bahwa capaian BPISDKP sudah cukup tinggi dibandingkan dengan satker lain di lingkup Sekretariat Jenderal KKP. Untuk pelaksanaan di tahun 2024 diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.



Gambar 7. Capaian IKU IP ASN Lingkup Sekretariat Jenderal KKP

3.2.6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2023, yang tidak ada sebelumnya pada Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2022. IKU ini merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

FORMULA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi

untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

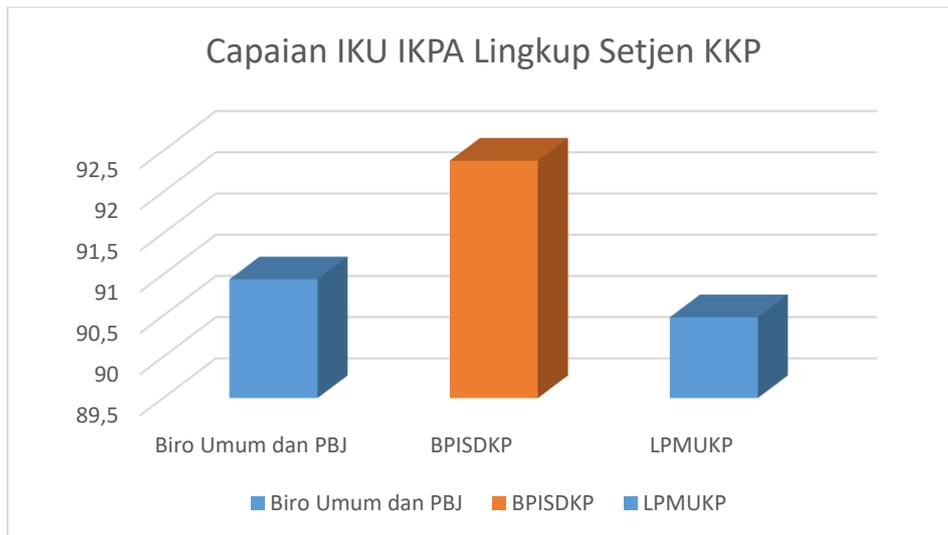
1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%
8. Capaian Output – Bobot Penilaian 5%

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP					
2023	Target 2022	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Realisasi	% Capaian
	-	-	-	93,75	92,37	98,53

Tidak terdapat perbandingan capaian dengan tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2022 anggaran BPISDKP masih tergabung dengan Pusdatin. Target pada tahun 2023 awalnya adalah 83, namun pada triwulan IV target berubah menjadi 93,75 dengan periode pengukuran tahunan. Hingga akhir 2023, capaian IKPA BPISDKP mencapai 92,37 dimana nilai tersebut masih dibawah target. Dua komponen yang nilainya masih rendah yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Perubahan target pada triwulan IV mengakibatkan kesulitan untuk mengejar nilai IKPA dikarenakan waktu yang sudah mendekati akhir tahun, dimana hampir seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan IKPA di tahun 2023 akan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan di tahun 2024.

Dalam lingkup Sekretariat Jenderal KKP, satker yang memiliki IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hanya ada 3 satker. Jika dibandingkan dengan kedua satker tersebut maka capaian BPISDKP tergolong tinggi, walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan. Perbandingan capaian BPISDKP dengan satker tersebut terkait IKU IKPA ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 8. Capaian IKU IKPA Lingkup Sekretariat Jenderal KKP

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya IKU ini adalah:

- Penyelenggaraan rapat Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran secara rutin setiap bulan
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN II DIPA	PENERAPAN ANGGARAN	BILANGAN KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT				
1	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100,00	73,88	74,94	100,00	100,00	99,89	100,00	100,00	92,37	100%	92,37	
					Bobot	10	10	20	10	10	10	8	28				
					Nilai Akhir	10,00	7,39	14,99	10,00	10,00	9,99	9,00	28,00				
					Nilai Akhir	86,94				94,97		100,00					

Gambar 9. Nilai IKPA BPISDKP hingga akhir triwulan IV tahun 2023

3.2.7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP

Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. IKU ini bertujuan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran BPISDKP dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BPISDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.



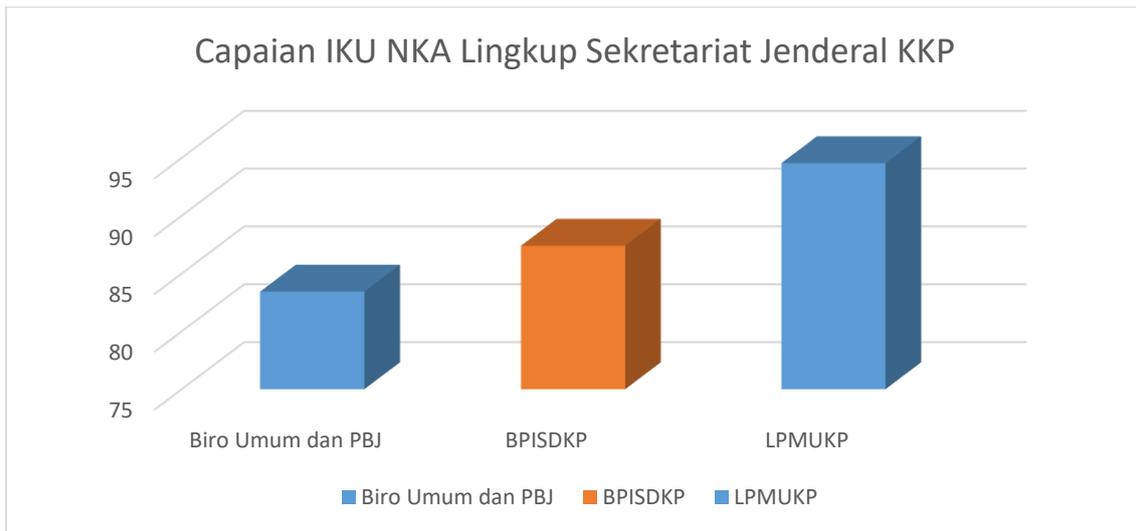
Gambar 10. Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP tahun 2023

Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 untuk IKU ini adalah 86 dengan periode pengukuran tahunan. Upaya untuk memenuhi target tersebut telah dilakukan melalui kegiatan terkait IKU berupa koordinasi antara Kepala Balai dan Kasubbag Umum dengan penanggung jawab kegiatan terkait penyerapan anggaran melalui rapat Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran rutin, input capaian output pada aplikasi keuangan, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP					
2023	Target 2022	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Realisasi	% Capaian
	-	-	-	86	87,40	101,63

Perbandingan dengan tahun 2022 tidak dapat dilakukan karena IKU ini tidak terdapat pada PK BPISDKP Tahun 2022. Pada tahun 2022 IKU yang diukur hanya penyerapan anggaran saja, sedangkan pengukuran tahun 2023 untuk IKU NKA meliputi beberapa komponen lain yaitu Capaian Rincian Output (CRO) dan efisiensi. Jika dibandingkan dengan capaian pada satker di lingkup Sekretariat Jenderal KKP, maka capaian IKU NKA dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 11. Capaian IKU NKA di lingkup Sekretariat Jenderal KKP

3.2.8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP

Mengukur terselenggaranya laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat diperbandingkan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat tindak lanjut yang dilakukan atas temuan dalam laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan sendiri merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran tersebut didasarkan pada empat kriteria yakni sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP					
2023	Target 2022	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Realisasi	% Capaian
	100	100	100	100	100	100

Pada tahun 2023 target yang ingin dicapai adalah 100 persen, atau dengan kata lain penyelesaian terhadap seluruh temuan BPK. Hingga akhir tahun 2023 tidak terdapat temuan BPK yang perlu ditindak lanjuti, sehingga capaian pada tahun ini adalah 100%. Tidak terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait IKU ini. Kegiatan yang

dilakukan dalam rangka pelaksanaan IKU ini adalah koordinasi rutin tim keuangan dalam pengelolaan anggaran, rekonsiliasi dan penyusunan laporan. Koordinasi dilakukan baik secara internal tim maupun eksternal dengan instansi terkait lain, seperti KPPN dan Kanwil.

3.2.9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satker BPISDKP berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran dilakukan melalui jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh BPISDKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan rumus:

$$\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan} = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada BPISDKP

Pada tahun 2023 target yang ingin dicapai adalah 75%, pada triwulan I dan II telah dilaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan dari ITJEN terhadap beberapa temuan di BPISDKP, sedangkan pada triwulan III dan IV tidak terdapat temuan yang perlu ditindak lanjuti, sehingga berdasarkan memorandum dari Kepala Biro Keuangan nomor 1670/SJ.2/TU.210/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Capaian IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan III Tahun 2023 poin 4, apabila tidak ada rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti maka capaian indikator dilaporkan sesuai target yaitu 75% dengan persen capaian 100%.

Hasil pengawasan BPISDKP pada triwulan I dan triwulan II yang telah ditindak lanjuti adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pertanggung jawaban perjalanan dinas biasa yang diberikan uang harian, namun masih membebankan transport lokal senilai Rp.354.500,00

Rekomendasi: Menginstruksikan kepada pegawai yang bersangkutan/pelaksana perjalanan dinas untuk mengembalikan kelebihan pembayaran transport local senilai Rp.354.000,00

Tindak lanjut: Telah ditindak lanjuti dengan bukti setor pengembalian uang transport local dengan total nilai Rp.354.000,00

2. Terdapat pertanggung jawaban keuangan untuk transport perjalanan dinas yang belum disertai dengan bukti dukung yang sah senilai Rp. 70.000,00

Rekomendasi: menginstruksikan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk melengkapi bukti dukung pertanggung jawaban transport / mengembalikan ke kas Negara senilai Rp. 70.000,00

Tindak lanjut: Telah ditindak lanjuti dengan bukti setor senilai Rp.70.000,00

3. Dokumen pertanggung jawaban pada 10 PBJ belum lengkap dengan rincian: belum tersedia BA Pemeriksaan Pekerjaan, belum tersedia laporan pekerjaan, belum tersedia HPS dan data dukung pembentuk HPS

Rekomendasi:

- a. Menginstruksikan PPK untuk melengkapi dokumen PBJ berupa HPS beserta data dukungnya, laporan pekerjaan, BA serah terima, BA pemeriksaan pekerjaan

Telah ditindak lanjuti dengan:

- a. Laporan pekerjaan perbaikan toilet L1 gedung utama
- b. HPS beserta data dukung dan laporan pekerjaan perbaikan plafon aula GEOL dan ruang kerja
- c. BAST nomor BAST.350.4/PPK-7/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan BA Pemeriksaan Pekerjaan nomor BAHP.350.4/PPK-7/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 Pekerjaan rehabilitasi gedung antenna penerima dataradar
- d. BAST Nomor BAST.350.1/PPK-7/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dan BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BAHP.350.1/PPK-7/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 Pekerjaan pembelian kabel perbaikan jaringan AVR Gedung antenna
- e. BAST Nomor BAST.350.2/PPK-7/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BAHP.350.2/PPK-7/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 Pekerjaan perbaikan panel jaringan Gedung observasi laut nasional
- f. Data dukung HPS pengadaan citra satelit radar
- g. HPS beserta data dukung pekerjaan perbaikan

- b. Menginstruksikan PPK Bersama tim teknis PBJ BPISDKP untuk membuat laporan pemeriksaan pekerjaan yang ditujukan kepada PPK Pusdatin pada Pengadaan Data Citra Satelit Radar, Pengadaan Perangkat Automatic Voltage Regulator, dan Pengadaan Perangkat PC Workstation Pengolah Data Citra Satelit Radar

Telah ditindak lanjuti dengan:

- a. Surat nomor B.665/BPISDKP/PL.460/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Penyampaian Laporan Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Perangkat AVR dari Kepala BPISDKP ke PPK Pusdatin
 - b. Surat nomor B.696/BPISDKP/PL.460/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 perihal Penyampaian Laporan pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Radar dari Kepala BPISDKP ke PPK Pusdatin
 - c. Surat nomor B.565/BPISDKP/PL.460/XII/2022 tanggal 7 November 2022 perihal Penyampaian Laporan Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan PC Workstation dari Kepala BPISDKP ke PPK Pusdatin
- c. Menginstruksikan PPK untuk melakukan uji coba pada perangkat AVR
- Telah ditindak lanjuti dengan BA Pemasangan AVR pada tanggal 23 Januari 2023 dengan hasil baik dan siap dioperasikan beserta dokumentasinya
- d. Menginstruksikan Operator SAKTI Modul BMN BPISDKP berkoordinasi dengan Biro Umum dan PBJ, Biro keuangan, Setjen KKP guna melakukan reklasifikasi asset dan dijelaskan pada CaLK atas transaksi:
1. PC Workstation sebanyak 4 unit dari software menjadi peralatan dan mesin
 2. Waterproofing Membrane bakar menjadi bagian penambahan asset Gedung ICT
 3. Melakukan register barang

Telah ditindak lanjuti dengan:

- a. Surat keterangan Koreksi Pencatatan Nomor B.660/BPISDKP/PL.760/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 atas pemeliharaan Gedung dan bangunan senilai Rp. 138.707.000,00 beserta data dukung Laporan Daftar BMN Intrakomtabel dengan jenis transaksi Koreksi Pencatatan Nilai bertambah pada bangunan Gedung kantor permanen
- b. Dokumentasi register barang atas 4 PC Workstation dan AVR
- c. Penjelasan pada CaLK atas penambahan nilai bangunan Gedung senilai Rp. 138.707.000,00 (waterproofing membrane bakar Gedung ICT) dan PC Workstation sebanyak 4 unit

- d. Memorandum Nomor 3835/SJ.7/PL/750/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Reklasifikasi dan Koreksi pencatatan BMN pada PKPB Pusdatindari Plt. Kepala Pusdatin ke Kepala Biro Umum dan PBJ (beserta kronologi reklas, SPTJM dan hasil inventarisasi BMN pada Pusdatin)
 - e. Register Transaksi Harian Reklasifikasi Masuk tanggal 30 s.d. 31 Desember 2022 untuk PC Workstation sebanyak 4 unit dengan kode Aset 3100101007
4. Terdapat kekurangan volume pekerjaan perbaikan mess 9 senilai Rp. 1.670.013,45
 Rekomendasi: menginstruksikan kepada CV De Ka untuk menyetorkan ke kas negara senilai Rp. 1.670.013,45
 Tindak lanjut: Telah ditindak lanjuti dengan Bukti Setor ke Kas Negara senilai Rp. 1.670.013,00
5. Terdapat kelebihan pembayaran Rp. 1.000.000,00 kepada PLN
 Rekomendasi: Menginstruksikan kepada PPSPM untuk menyetorkan kelebihan bayar ke Kas Negara senilai Rp. 1.000.000,00 menggunakan akun 425912
 Tindak lanjut: telah ditindak lanjuti dengan Bukti Setor ke Kas negara senilai Rp. 1.000.000,00.

Selain itu, telah dilakukan upaya pemantauan rencana pengadaan sarana data citra satelit radar oleh tim Inspektorat I, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sesuai RKA K/L BPISDKP TA 2023 diketahui paket pengadaan data citra satelit radar sebanyak 315 scene, penyediaan suku cadang, pemeliharaan sistem radar, dan pelatihan bagi teknisi seluruhnya senilai Rp9.000.000.000,00 dengan HPS senilai Rp8.990.065.363,00. Rincian pagu paket pengadaan, yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai RKA-KL	Keterangan
1	Pengadaan Data Citra Satelit Radar	5.000.000.000	215 scene Cosmo SkyMED dan 100 scene Radarsat-2
2	Penyediaan suku cadang mekanikal antena	395.000.000	Dehydrator, uplink cable, ethernet switch
3	Daily maintenance of the radar data ordering system	1.480.000.000	180 hari pemeliharaan
4	Daily maintenance of the system for the processing and analysis of radar data	335.000.000	180 hari pemeliharaan
5	Daily maintenance of information technology network system	305.000.000	180 hari pemeliharaan

6	Daily maintenance of the radar data receiving antenna system	1.240.000.000	180 hari pemeliharaan
7	Pelatihan	245.000.000	CUT and SEonSE training
Total		9.000.000.000	

Selain paket tersebut, terdapat paket pengadaan data radar sebanyak 314 *scene* senilai Rp3.492.294.000,00 yang masih mengalami blokir anggaran.

2. Rencana pengadaan dengan **metode Penunjukan Langsung** kepada Perusahaan e-GEOS, dengan pertimbangan perusahaan tersebut sebagai pemilik Hak Paten Satelit Radar COSMO-SkyMD. Hal ini telah sesuai kriteria keadaan tertentu dalam penunjukan langsung, dalam Perpres 12 Tahun 2021 Pasal 38 ayat (4) huruf g. Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan **hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten**, atau pihak yang telah mendapat ijin dari pemegang hak paten.
3. Pengadaan data citra satelit radar dan sistem pemeliharanya dibutuhkan dalam rangka mendukung kegiatan *Command Center* KKP antara lain terkait pengendalian pergerakan kapal ikan dan tumpahan minyak/*spill oil* di laut.
4. Pengadaan suku cadang antena berupa *dehydrator*, *uplink cable*, *ethernet switch* senilai Rp395.000.000, diperlukan dengan pertimbangan:
 - a. Jika terdapat kerusakan operasional antena diperlukan penanganan cepat, sementara pemesanan suku cadang tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama (sekitar 3 bulan);
 - b. Antena *existing* akan digunakan sebagai sarana penerima untuk program Nano-Satellite KKP yang akan dikembangkan pada Tahun 2024.
5. Pelatihan bagi operator diperlukan dengan pertimbangan kurangnya SDM teknisi/operator BARATA yang saat ini sebanyak 3 orang tenaga kontrak, rencananya akan ditambah personil dari Pusdatin sebanyak 3 orang PNS sehingga diperlukan pelatihan.
6. Hal pokok pembahasan yaitu:
 - a. Tahapan rencana pengadaan data radar yang perlu segera disiapkan, yaitu:
 1. Perlu dilakukan *assessment* sistem stasiun bumi dilakukan oleh e-Geos sebagai kondisi awal sebelum pelaksanaan kontrak pada minggu kedua Mei 2023;
 2. Proses koordinasi dengan UKPBJ terkait dengan PDN dilaksanakan bersamaan dengan kaji ulang dokumen pengadaan pada minggu kedua Mei 2023;
 3. Rencana kontrak dimulai pada minggu pertama Juni 2023;

4. Rencana pelatihan/*training* dilaksanakan pada Triwulan III 2023.
- b. Risiko gagal akuisisi *scene* karena adanya anomali sistem, dikendalikan melalui rancangan kontrak pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang mensyaratkan antara lain: “jika terjadi kerusakan pada saat akuisisi di *ground station*, maka akan dilakukan akuisisi pada jaringan *ground station* eGEOS, kemudian data dikirim ke BARATA melalui FTP.”
- c. Untuk menghindari timbulnya permasalahan proses pengadaan, perlu segera:
 1. Melengkapi dokumen data dukung HPS terbaru dan relevan;
 2. Melengkapi surat bukti pemegang hak paten dari perusahaan e-GEOS;
 3. Memperbaiki KAK terkait:
 - spesifikasi teknis poin “Komponen mekanikal antena meliputi *dehydrator*, *uplink cable*, dan *ethernet switch* tersedia dan terinstal pada periode kontrak” dapat dihilangkan kata terinstal, karena *spare part* tersebut masuk pada akun 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi;
 - perincian jenis dan jumlah *scene* radar, yaitu 215 *scene* Cosmo SkyMED dan 100 *scene* Radar Sat-2.
 4. Rencana pembayaran kontrak dilakukan 2 (dua) termin, namun belum diatur pada SSKK terkait besaran prestasi fisik sebagai dasar pembayaran, sertasetiap termin pembayaran dilengkapi dengan dengan laporan kemajuan prestasi pekerjaan.
7. Selain rencana paket pengadaan data citra di atas, dibahas pula keperluan perbaikan sambungan langganan daya listrik, mengingat listrik yang teraliri untuk kebutuhan pengelolaan data radar dan perkantoran kurang stabil disebabkan jaringannya tergabung dengan penggunaan masyarakat sekitar. Adapun existing sambungan langganan daya listrik sebanyak 3 (tiga) ID pelanggan, yaitu 23 KVA, 105 KVA, dan 197 KVA. Atas kondisi tersebut pihak BPISDKP telah berkoordinasi dengan PLN setempat dan disarankan agar perlu dibuat Jaringan Tegangan Menengah khusus bagi Kantor BPISDKP dan ketiga ID Pelanggan digabungkan menjadi 1 (satu) ID pelanggan dengan kapasitas 345 KVA.
8. Sehubungan dengan hal pokok pembahasan di atas, rekomendasi yang diberikan pada KPA/PPK adalah:
 - a. Melengkapi dokumen data dukung HPS terbaru dan relevan;

- b. Melengkapi surat bukti pemegang hak paten dari Perusahaan e-GEOS;
- c. Memperbaiki KAK antara lain mengenai penjelasan jenis dan jumlah data radar, serta penyediaan suku cadang antena;

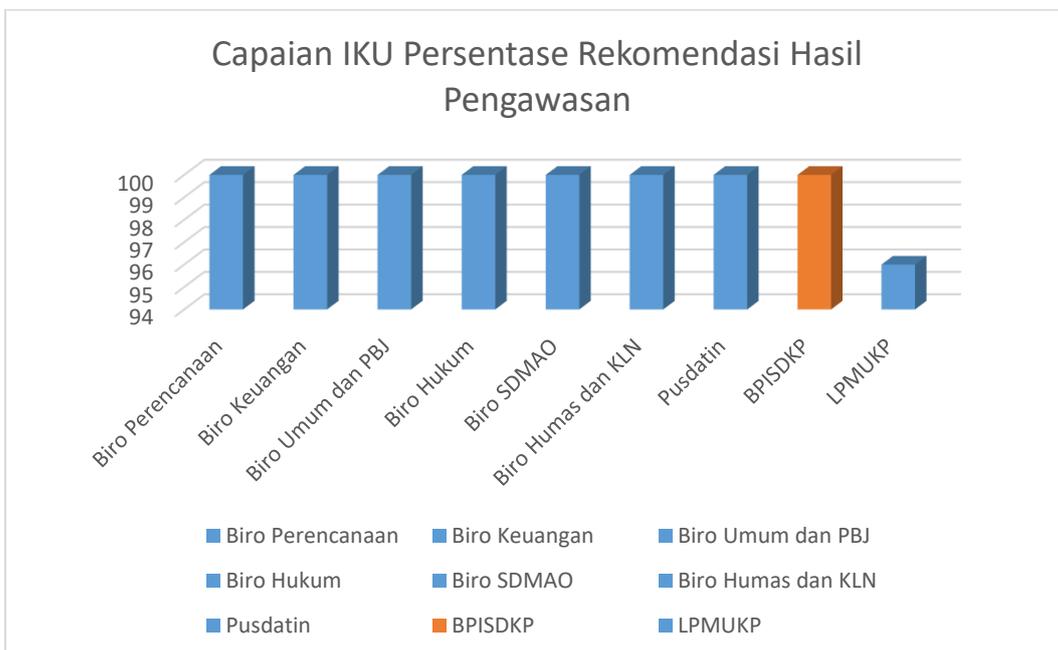
Menyusun Rancangan Kontrak terkait SSKK antara lain mengenai syarat termin pembayaran, dan risiko gagal akuisisi *scene*.

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP					
2023	Target 2022	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Realisasi	% Capaian
	70	100	120	75	75	100

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan target dari 70% menjadi 75%, namun realisasi dan capaian mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan penetapan realisasi pada nilai sesuai target jika tidak terdapat temuan yang harus ditindak lanjuti. Walaupun pada triwulan I dan II diperoleh capaian 100% namun berdasarkan manual IKU, nilai capaian berdasarkan pada nilai posisi akhir, sehingga capaian akhir untuk IKU ini pada tahun 2023 adalah 75% dengan persentase capaian 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada satker lain di lingkup Sekretariat Jenderal KKP, maka hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 12. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal KKP

3.2.10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

Pada Triwulan IV terdapat perubahan IKU Dimana IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP dengan target 95 berubah menjadi IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP dengan target 80,5. Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan **Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021** tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

- a. Perencanaan Kinerja (30%)
- b. Pengukuran Kinerja (30%)
- c. Pelaporan Kinerja (15%)
- d. Evaluasi Kinerja (25%)

Nilai PM SAKIP BPISDKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal atas implementasi SAKIP di BPISDKP, dan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPISDKP. Kategori nilai PM SAKIP BPISDKP yaitu:

Tabel 17. Kategori Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

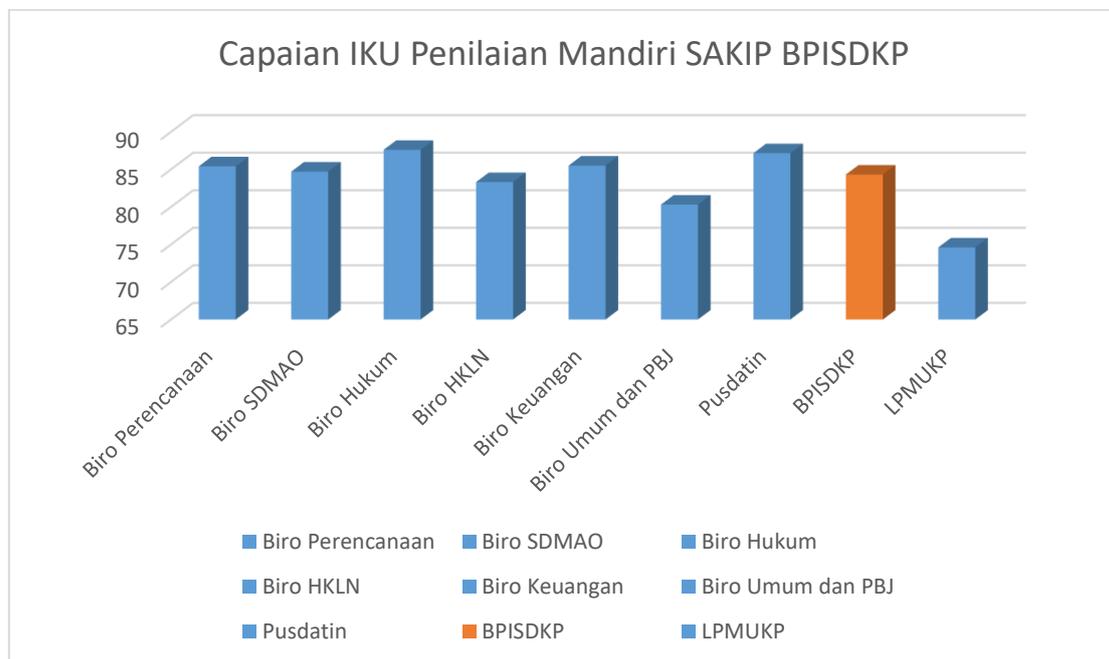
Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP					
2023	Target 2022	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Realisasi	% Capaian
	-	-	-	80,5	84,3	104,72

Target tahun ini adalah 80,5 dengan periode pengukuran tahunan. Berdasarkan hasil pengukuran yang dinyatakan pada Memorandum Kepala Biro Perencanaan nomor 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP

Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023, hasil penilaian mandiri SAKIP BPISDKP memperoleh nilai 84,30. Nilai ini telah melebihi target yang ditetapkan dengan nilai capaian 104,72. Perbandingan dengan tahun 2022 tidak dapat dilakukan karena pada tahun 2022 IKU yang diukur adalah Nilai Rekonsiliasi Kinerja yang menitikberatkan pada pengelolaan dokumen kinerja, sedangkan IKU Penilaian Mandiri SAKIP meliputi seluruh aspek kinerja, baik perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi. Tidak hanya dokumen, namun penerapan pada pelaksanaan kegiatan juga menjadi poin penilaian. Jika dibandingkan dengan satker lain di lingkup Sekretariat Jenderal KKP, maka hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 13. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP di lingkup Sekretariat Jenderal KKP

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait IKU ini. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan IKU ini berupa koordinasi rutin antara tim pengelola kinerja dengan penanggung jawab kegiatan terkait progress kegiatan, capaian, dan penyiapan data dukung yang dibutuhkan. Untuk pelaksanaan tahun berikutnya, diharapkan poin-poin yang masih belum terpenuhi pada tahun ini dapat dipenuhi, sedangkan untuk poin yang sudah terlaksana agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

3.2.11. Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKU dilakukan melalui Survei

Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran SKM adalah Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Penanganan Pengaduan, sarana dan Prasarana

Indeks Kepuasan Pelanggan pelayanan publik BPISDKP (Skala 100) merupakan respon balik pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan serta produk BPISDKP yang menjadi bagian output dari kegiatan pelaksanaan anggaran dalam memenuhi permintaan pelanggan atau publik yang ditampilkan dalam suatu nilai indeks. Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah 83.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP

SK	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP					
2023	Target 2022	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Realisasi	% Capaian
	3,7	3,9	105,41	83	97	116,87

Dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat perbedaan skala yang digunakan dalam pengukuran, Dimana sebelumnya digunakan skala 4. Jika nilai realisasi tahun 2023 dikonversi menjadi skala 4 maka diperoleh nilai 3,88. Nilai ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Komponen penilaian yang mengalami penurunan adalah:

- Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- Kompetensi petugas pelaksana atau system
- Produk / jasa spesifikasi
- Biaya / tarif
- Prosedur pelayanan
- Persyaratan pelayanan

Walaupun penurunan yang terjadi tidak terlalu tajam, namun dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan pada tahun 2024 sehingga kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pendukung IKU ini yaitu:

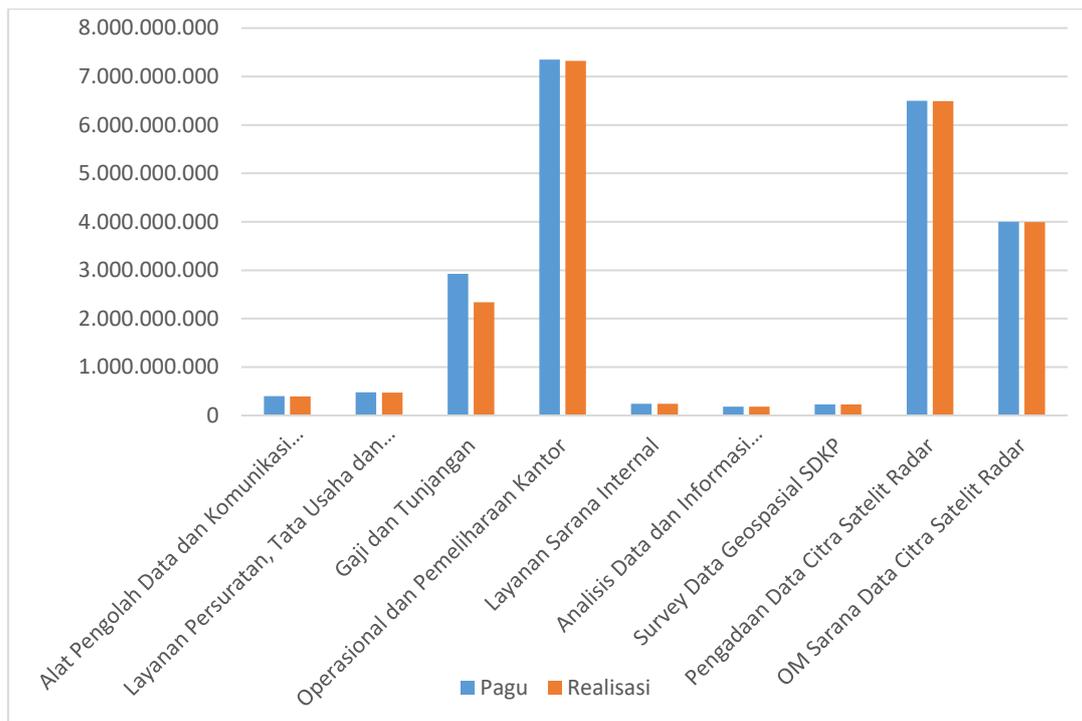
- Penerimaan sampel eksternal laboratorium
- Pelaksanaan Pelatihan Audit Internal ISO 17205
- Uji banding antar laboratorium
- Pelatihan perhitungan estimasi ketidakpastian
- Penyampaian informasi terkait jam pelayanan, alur permohonan informasi publik, tarif biaya pengujian kualitas air, dan aplikasi SIMANTAP
- Survey mutu estuary Perancak
- Penerimaan kunjungan dari tim PTSP Pusdatin KKP dalam rangka review pelayanan publik yang ada di BPISDKP.
- Penerimaan kunjungan belajar dari sekolah
- Penerimaan kunjungan dari instansi pemerintah lainnya.

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola BPISDKP Tahun 2023 adalah senilai **Rp.22.303.218.000**. Penyerapan hingga 31 Desember 2023 sebesar **Rp.21.672.569.443** atau sebesar **97,17%**. Untuk lebih jelasnya alokasi pagu dan realisasi anggaran BPISDKP hingga Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP hingga 31 Desember 2023

Komponen	Pagu(Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	(%)	
Alat Pengolah Data dan Komunikasi BPISDKP	400.000.000		396.000.000	99	4.000.000
Layanan Persuratan, Tata Usaha dan kearsipan BPISDKP	475.800.000		475.742.431	99,99	57.569
Gaji dan Tunjangan	2.925.699.000		2.337.258.221	79.89	588.440.779
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.351.820.000		7.324.653.710	99.63	27.166.290
Layanan Sarana Internal	240.000.000		239.050.000	99.60	950.000
Analisis Data dan Informasi Geospasial SDKP	180.000.000		179.989.401	99.99	10.599
Survey Data Geospasial SDKP	229.899.000		229.014.305	99.62	884.695
Pengadaan Data Citra Satelit Radar	6.500.000.000		6.492.084.330	99.88	7.915.670
OM Sarana Data Citra Satelit Radar	4.000.000.000		3.998.777.045	99.97	1.222.955
TOTAL	22.303.218.000		21.672.569.443	97.17	630.648.557



Gambar 14. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 31 Desember 2023

3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan sumber daya yang digunakan dengan keluaran yang dihasilkan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah diatur perhitungan efisiensi RO tingkat satuan kerja yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n \{(alokasi\ anggaran \times\ capaian) - realisasi\ anggaran\}}{\sum_{i=1}^n (alokasi\ anggaran)} \times 100\%$$

Dimana capaian yang dimaksud adalah capaian kinerja BPISDKP pada tahun 2023. Maka perhitungan efisiensi BPISDKP jika dihitung berdasarkan rumus diatas adalah:

$$Efisiensi = \frac{\{(22.303.218.000 \times 1,0915) - 21.672.569.443\}}{22.303.218.000} \times 100\% = 11,98\%$$

Efisiensi dari sisi skala jika efisiensi batas bawah -20 maka batas atasnya 20. Efisiensi dalam perhitungan tersebut adalah sebesar 11,98 %. Untuk mengubah angka tersebut dalam nilai efisiensi (NE) skala 0-100% digunakan rumus $NE=50\%+(E/20 \times 50)$. Sehingga efisiensi BPISDKP dalam skala 100 adalah 79,95%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, kategori nilai efisiensi dibagi menjadi beberapa kategori dengan kriteria:

- Nilai efisiensi lebih dari 90% → sangat efisien
- Nilai efisiensi > 80% - 90% → efisien
- Nilai efisiensi > 60% - 80% → cukup efisien
- Nilai efisiensi <60% → kurang efisien

Dengan melihat hasil perhitungan diatas, nilai efisiensi BPISDKP sebesar 79,95% termasuk dalam kategori cukup efisien. Untuk mengetahui rincian efisiensi per komponen dapat dilihat dari perhitungan rasio efisiensi anggaran.

3.4.1. Analisa Efektivitas Anggaran

Analisis anggaran yang dibuat berupa analisis rasio keuangan untuk mengetahui kecenderungan kondisi keuangan BPISDKP pada suatu periode tertentu. Analisis rasio keuangan yang dilakukan pada laporan realisasi anggaran bulan Desember 2023 ini dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan Rasio Efisiensi. Rasio ini menggambarkan kemampuan pelaksana anggaran di BPISDKP dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan dengan target yang ditetapkan. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang tersedia.

$$\text{Rasio Efisiensi (RE)} = \frac{\text{realisasi anggaran}}{\text{pagu anggaran}} \times 100\%$$

Uraian kriteria tingkat efektivitas berdasarkan nilai Rasio Efisiensi (RE) kinerja keuangan ditampilkan pada Tabel 21 dibawah ini.

Tabel 21. Kriteria Efektivitas Keuangan Lembaga (Kepmendagri No. 690.900.327, 1996)

Persentase (%) Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Di bawah 60 %	Tidak efektif

Analisis Rasio Efisiensi

Perhitungan analisis rasio keuangan dilakukan untuk mengetahui persentase efektivitas kecenderungan pelaksanaan penggunaan anggaran hingga bulan ke-12 tahun berjalan (TA 2023). Analisis rasio keuangan ini dibuat secara deskriptif untuk memberikan gambaran

kemampuan pelaksanaan anggaran di BPISDKP dalam merealisasikan target yang direncanakan. Rasio efisiensi anggaran BPISDKP ditunjukkan pada table 22.

Tabel 22. Rasio efisiensi anggaran BPISDKP

Komponen	Pagu	Realisasi	Rasio Efisiensi
Alat Pengolah Data dan Komunikasi BPISDKP	400.000.000	396.000.000	99
Layanan Persuratan, Tata Usaha dan kearsipan BPISDKP	475.800.000	475.742.431	99,99
Gaji dan Tunjangan	2.925.699.000	2.337.258.221	79.89
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.351.820.000	7.324.653.710	99.63
Layanan Sarana Internal	240.000.000	239.050.000	99.60
Analisis Data dan Informasi Geospasial SDKP	180.000.000	179.989.401	99.99
Survey Data Geospasial SDKP	229.899.000	229.014.305	99.62
Pengadaan Data Citra Satelit Radar	6.500.000.000	6.492.084.330	99.88
OM Sarana Data Citra Satelit Radar	4.000.000.000	3.998.777.045	99.97
TOTAL	22.303.218.000	21.672.569.443	97.17

Berdasarkan hasil Rasio Efisiensi (RE) terlihat hampir seluruh komponen sudah efektif kecuali komponen gaji dan tunjangan. Rasio ini menunjukkan bahwa komponen yang berstatus efektif tersebut telah melakukan penggunaan anggaran dengan efektif berdasarkan target atau rencana penyerapannya. Realiasi anggaran pada periode TA 2023 dari kegiatan tersebut cukup sesuai dengan yang direncanakan. Untuk komponen gaji dan tunjangan, efisiensi yang relatif rendah disebabkan karena faktor eksternal, yaitu perubahan pada komposisi pegawai, dimana terdapat beberapa pegawai yang mutasi ke instansi lain dan berubah status dari PPNPN menjadi PPPK. Perubahan yang terjadi di triwulan akhir mengakibatkan kesulitan untuk merevisi anggaran, sehingga sebagian anggaran yang telah diperhitungkan sebelumnya tidak dapat terserap.

Jika dilihat per Indikator Kinerja Utama, maka rincian anggaran dan rasio efisiensi anggaran per IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23. Rincian dan Rasio Efisiensi Anggaran per IKU

Indikator Kinerja Utama	Pagu	Realisasi	Rasio Efisiensi
Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	215.200.000	215.070.079	99,94
Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	409.899.000	409.003.706	99,78
Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10.500.000.000	10.490.861.375	99,91
Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	1.944.145.000	1.933.273.801	99,44
Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP	3.032.758.000	2.444.288.071	80,59
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2.707.328.000	2.706.306.167	99,96
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP	2.496.528.000	2.485.661.003	99,56
Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP	467.831.000	463.830.872	99,14
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP	324.830.000	319.633.880	98,40
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	29.760.000	29.758.089	99,99
Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP	174.939.000	174.882.400	99,97
TOTAL	22.303.218.000	21.672.569.443	97,17

Terlihat bahwa hamper seluruh IKU telah menggunakan anggaran secara efektif, kecuali IKU Indeks Profesionalitas ASN yang masih berstatus cukup efektif. Ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran secara keseluruhan sudah cukup baik.

Bab IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sebaik mungkin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPISDKP yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2023 BPISDKP memiliki 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang merupakan turunan dari tugas, pokok dan fungsi BPISDKP. Hingga akhir 2023 seluruh IKU telah terlaksana secara baik dengan nilai kinerja 109.15 dan pengelolaan anggaran BPISDKP telah menghasilkan penyerapan sebesar 97.17%.

4.2. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi yang disampaikan pada Laporan Kinerja Tahunan merupakan bahan masukan untuk pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya. Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasi dapat dibagi menjadi beberapa aspek yaitu:

- a. Penggunaan rekomendasi pada Laporan Kinerja untuk penyesuaian aktivitas organisasi
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada tahun 2023 ini, terdapat rekomendasi untuk aktivitas organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, seperti kegiatan pemeliharaan fasilitas perkantoran yang mayoritas baru dilaksanakan pada triwulan II dan III sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran. Untuk tahun 2024 disarankan untuk melakukan penyesuaian dengan membagi pelaksanaan kegiatan sejak triwulan I agar penyerapan anggaran lebih merata.
- b. Penggunaan rekomendasi pada Laporan Kinerja untuk penyesuaian penggunaan anggaran

Terkait penggunaan anggaran, rekomendasi yang diberikan salah satunya kepada para penanggung jawab kegiatan agar lebih tertib dalam pengajuan Uang Persediaan dan penyelesaian pertanggung jawaban setiap bulannya sehingga penggunaan anggaran dapat dipantau dengan baik agar sesuai dengan perencanaan yg telah diajukan. Hal ini terutama terkait dengan komponen Deviasi Halaman III DIPA yang nilainya masih rendah sehingga mempengaruhi nilai IKPA BPISDKP pada tahun 2023. Diharapkan perbaikan

pengelolaan anggaran dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pendukung IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPISDKP di tahun 2024.

c. Penggunaan rekomendasi pada Laporan Kinerja untuk penyesuaian perencanaan

Rekomendasi untuk penyesuaian perencanaan BPISDKP adalah penyesuaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024, yaitu IKU Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi yang dilebur dengan IKU Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil survey kepuasan pelanggan yang menunjukkan salah satu poin penilaian yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya adalah komponen spesifikasi produk /jasa. Selain itu, layanan permintaan data sendiri juga dirasa lebih sesuai sebagai komponen pelayanan publik dibandingkan sebagai kegiatan teknis. Faktor lain adalah jumlah permintaan data yang hanya sedikit, menunjukkan bahwa belum banyak pengguna layanan BPISDKP yang mengetahui tentang layanan ini. Diharapkan masuknya layanan permintaan data sebagai salah satu jenis layanan publik dapat menginformasikan kepada pelanggan pelayanan public BPISDKP minat terhadap layanan ini dapat meningkat.

d. Penggunaan rekomendasi pada Laporan Kinerja untuk perubahan budaya kinerja

Penggunaan rekomendasi untuk perubahan budaya kinerja salah satunya adalah pada IKU IP ASN dimana pegawai didorong untuk lebih aktif mencari pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas masing-masing, dan juga agar disiplin mengupdate informasi pelatihan pada e-pegawai. Pemanfaatan media grup WA untuk menyampaikan informasi pelatihan dan seminar yang dapat diikuti juga sangat membantu terlaksananya kegiatan dengan baik. Contoh lain adalah penyampaian informasi terkait kegiatan dan kinerja BPISDKP oleh Kepala Balai pada apel pagi, serta koordinasi rutin antara Kepala Balai dan penanggung jawab kegiatan melalui rapat yang dilaksanakan setiap awal bulan.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, beberapa rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja dan sebagai perbaikan dari pelaksanaan pada tahun 2023 antara lain:

- a. Perencanaan anggaran dengan lebih matang untuk meningkatkan nilai efisiensi anggaran, terutama pada komponen deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran agar disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana yang telah diusulkan sebelumnya;

- b. Koordinasi rutin antara Kepala Balai dengan penanggung jawab kegiatan melalui rapat pelaksanaan pengelolaan anggaran setiap bulan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran;
- c. Upgrade sistem yang digunakan untuk kegiatan data citra satelit radar untuk menghindari terjadinya reject dan gagal akuisisi;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan perbaikan pada komponen pelayanan public yang mengalami penurunan nilai berdasarkan survey kepuasan masyarakat;
- e. Mengingat keterbatasan jumlah personel pendukung kegiatan teknis, maka untuk tahun 2024 IKU teknis Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi akan diintegrasikan dengan IKU Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik. Hal ini terkait pula dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan public dengan cara penambahan jenis layanan. Diharapkan melalui upaya peningkatan kualitas layanan publik yang menjadi bagian dari IKU Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik dapat meningkatkan minat terhadap layanan permintaan data dan layanan BPISDKP lainnya.

Laporan Kinerja BPISDKP Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, monitoring dan evaluasi serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Teja Arief Wibawa**
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Aulia Riza Farhan**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan
Informasi


Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Teja Arief Wibawa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2023
1	Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan informasi sumber daya kelautan dan perikanan	1	Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	80
		2	Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terverifikasi dan Tervalidasi (jenis)	2
		3	Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	80
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92
		5	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	79
		6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP (nilai)	89
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPISDKP (Persen)	100
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (persen)	75
		10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP (nilai)	95
		11	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	83

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	11.393.319.000, -
2	Pengelolaan Data dan Informasi	26.680.129.000, -
Total Anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		38.073.448.000, -

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
 Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi


 Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
 Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


 Teja Arief Wibawa

Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2023 Awal



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82251
TELEPON (0366) 44269
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Teja Arief Wibawa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 November 2023

Pihak Kedua
Pit. Kepala Pusat Data, Statistik,
dan Informasi

Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Teja Arief Wibawa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
1 Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan informasi sumber daya kelautan dan perikanan	1 Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	80
	2 Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terverifikasi dan Tervalidasi (jenis)	2
	3 Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	80
2 Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4 Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92
	5 Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	79
	6 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP (nilai)	93.75
	7 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86
	8 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPISDKP (Persen)	100
	9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (persen)	75
	10 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPISDKP (nilai)	80.5
	11 Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	83

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	11.393.319.000, -
2	Pengelolaan Data dan Informasi	10.909.899.000, -
Total Anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		22.303.218.000, -

Jakarta, 01 November 2023

Pihak Kedua
 Plt. Kepala Pusat Data, Statistik,
 dan Informasi


 Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
 Kepala Balai Pengelolaan Informasi
 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


 Teja Arief Wibawa

Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2023 Revisi November